

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

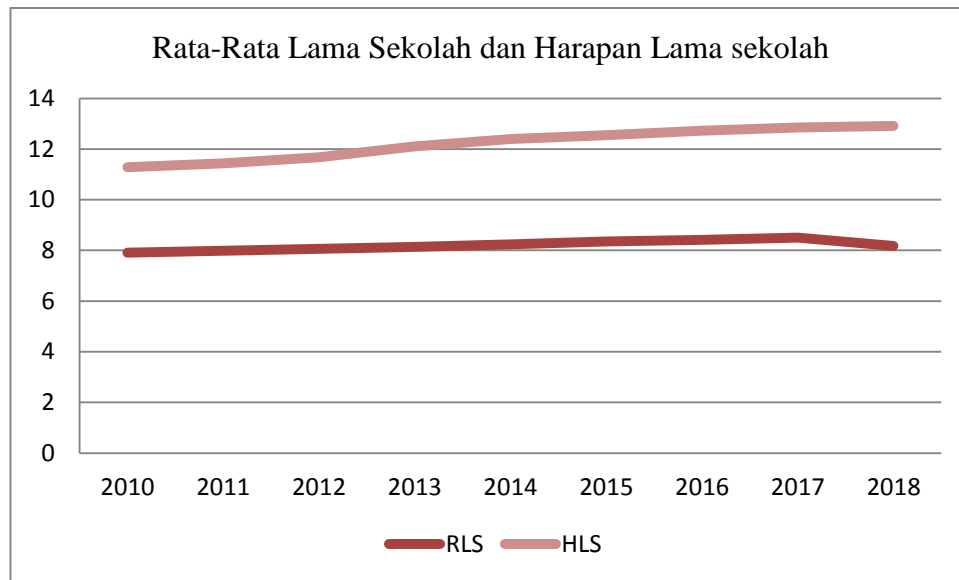
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk dengan jumlah yang padat. Menurut World Bank (2018) Indonesia menduduki peringkat empat dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 263,991,379 jiwa. Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar tentu memiliki banyak keuntungan, salah satunya yakni dengan melimpahnya Sumber Daya Manusia. Namun permasalahan timbul ketika Sumber Daya Manusia yang dimiliki tidak memiliki kualitas yang baik. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah investasi bagi suatu Negara. Sumber Daya Manusia yang berkualitas memberikan keuntungan bagi suatu Negara. Artinya Negara yang maju ialah Negara yang memiliki penduduk dengan tingkat kualitas yang baik.

Salah satu cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat melalui pendidikan. Secara operasional, upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya (Mulyadi, 2003). Sektor pendidikan adalah bagian yang krusial dalam tujuan pembangunan suatu Negara. Tidak dapat dipungkiri melalui sektor pendidikan sebagai penyumbang besar kemajuan suatu Negara. Pendidikan adalah kunci untuk realisasi sebagian besar target tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan sebagai alat pengembangan ditegakkan oleh sebagian besar ahli teori pembangunan sebagai hal yang esensial dalam perkembangan setiap masyarakat. Pendidikan adalah bentuk usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah guna mempersiapkan Sumber daya Manusia yang berkualitas agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1).

Pendidikan sebagai pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat (Mudyahardjo, 2008). Pendidikan dijadikan sebagai pendongkrak kemajuan masa depan suatu negara. Berbagai upaya telah dicoba oleh pemerintah demi meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan. Dalam upaya peningkatan mutu serta pemerataan pendidikan dan tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya pendidikan bagi seluruh anak Indonesia dan penurunan kesenjangan pendidikan antarwilayah. Pemerintah telah

mencanangkan program wajib belajar yaitu pasal 6 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 terkait usia wajib belajar 7 s.d. 15 tahun (wajib belajar 9 tahun). Hingga berkembang menjadi wajib belajar 12 tahun.



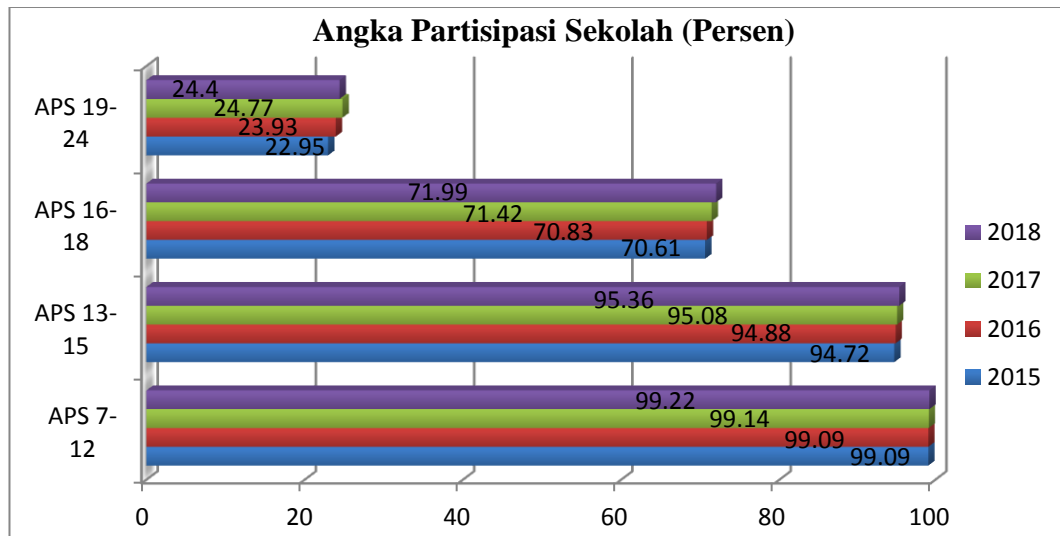
Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Gambar I.1
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan grafik di atas, bahwa harapan pemerintah dapat terlaksana dari harapan lama sekolah yakni samapai 12 tahun dan dari grafik tersebut menunjukkan bahwa angka hampir mendekati lama sekolah 9 tahun, dan masih jauh dari angka 12 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa target pemerintah belum dikatakan berhasil. Meskipun Program Wajib Belajar Sembilan tahun sudah berjalan di Indonesia, tetapi masih terdapat persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti masih banyaknya angka putus sekolah dan angka tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu indikator pendidikan dikatakan merata atau tidak dapat dilihat seberapa besar partisipasi sekolah yang disumbangkan untuk kemajuan suatu bangsa. Melalui angka partisipasi sekolah dapat dilihat seberapa besar gambaran

secara umum penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Tentunya sebagai dasar untuk melihat seberapa banyak anak Indonesia diberbagai belahan provinsi yang dapat mengenyam pendidikan. Tugas pemerintah memastikan bahwa peserta didik dapat menajaki pendidikan sampai pada jenjang yang lebih tinggi.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Gambar I.2
Grafik Angka Partisipasi Sekolah dalam (Persen)

Data di atas merupakan presentase Angka Partisipasi Sekolah di mana untuk jenjang usia 7-12 tahun terlihat sudah hampir memenuhi target, sedangkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil angka partisipasi sekolah. Menurut data BPS persebaran angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diberbagai jenjang kelompok usia pendidikan. Bahwa presentase angka partisipasi sekolah tidak memiliki laju angka presentase yang baik, hanya saja sedikit meningkat. Pemerataan pendidikan belum dapat diwujudkan terlebih untuk jenjang pendidikan 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil partisipasi sekolah, dikarenakan RPJM pemerintah adalah tujuan pembangunan wajib belajar 9 dan bahkan 12 tahun, yakni terdapat

kesenjangan pada salah satu jenjang pendidikan, maka difokuskan kepada kelompok usia partisipasi sekolah 16-18 tahun. Berdasarkan hasil Susenas oleh BPS menunjukkan wilayah-wilayah yang memiliki angka partisipasi sekolah di bawah rata-rata angka partisipasi sekolah Nasional. Seperti pada beberapa wilayah yang tidak memiliki persebaran partisipasi sekolah yang tidak begitu baik. Menandakan masih menjadi tugas pemerintah di berbagai belahan Provinsi yang memiliki presentase angka partisipasi sekolah dibawah rata-rata angka partisipasi nasional. Pada tahun 2018 dimana wilayah yang memiliki presentase paling rendah antara lain provinsi Papua, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Banten yang memiliki presentase partisipasi tidak lebih dari 68% dan masih banyak beberapa daerah provinsi lainnya.

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semakin kecil angka partisipasi sekolah yang disumbangkan. Maka tidak selalu meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti pendidikan seluruh daerah merata. Maka sebaiknya pendidikan perlu diperhatikan jika masih banyak daerah yang kecil presentase partisipasi sekolahnya artinya program pemerintah dalam sektor pendidikan belum berhasil. Belum berhasil dikarenakan tinggi rendahnya mutu pendidikan dilihat sejauh mana pemerataan pendidikan untuk anak Indonesia. Selain itu Putus Sekolah juga sebagai salah satu alasan rendahnya partisipasi sekolah. Putus Sekolah menurut Gunawan (2010) memberikan pengertian bahwa putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Semakin besar usia

sekolah, semakin besar pula angka putus sekolah. Terlebih kepada usia yang menjajaki 16 tahun ke atas. Seperti yang dikutip dari (POJOKJABAR.com, 2017) 17 ribu siswa di kota bogor putus sekolah, dikarenakan tidak adanya dukungan dari orang tua untuk bersekolah, melainkan memacu anak-anak untuk membantu mencari uang.

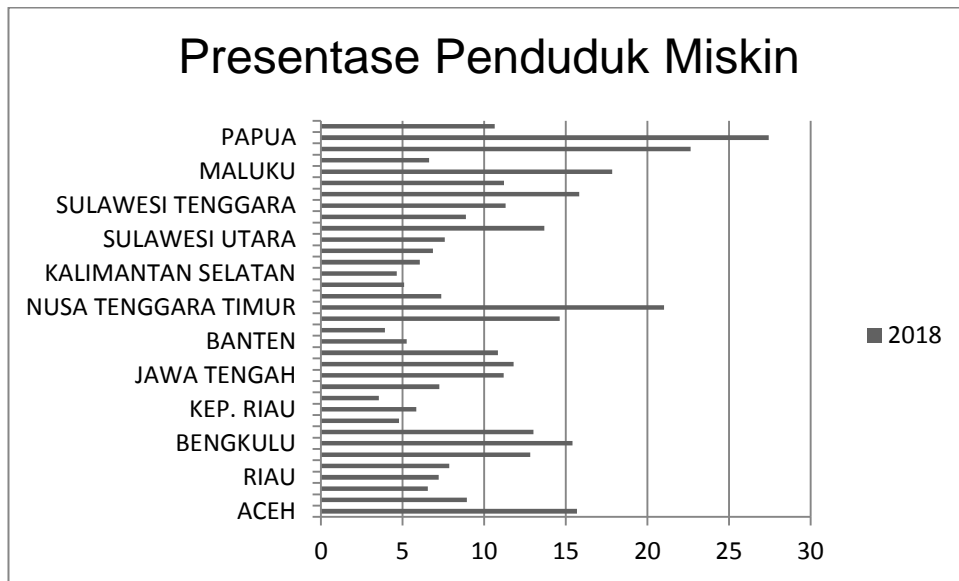
Besar kecilnya angka prtisipasi sekolah tidak terlepas dari faktor latar belakang ekonomi keluarga, seperti tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu faktor sebab anak tidak dapat melanjutkan atau terhenti sekolahnya. Sebahagian anak yang tidak bisa bersekolah dikarenakan, kemiskinan yang kian merekat. Kemiskinan yang masih saja menjadi alasan masyarakat Indonesia untuk berhenti bersekolah. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin rendah angka partisipasi sekolah, karena kemiskinan membatasi anak untuk dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kemiskinan sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Karena apabila kemiskinan juga tidak dapat dituntaskan maka dapat berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistika (2017) merupakan keadaan seorang individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar tertentu. Pendidikan disandarkan kepada besar kecilnya tingkat ekonomi keluarga tersebut, apabila tingkat ekonomi memiliki output yang besar maka anak dari keluarga tersebut dapat bersekolah dan sebaliknya apabila output keluarga tersebut tidak begitu baik tingkatannya maka anak tersebut tidak dapat

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau bahkan bisa sampai tidak melanjutkan sekolah sehingga mengalami putus sekolah.

Tinggi rendahnya latar belakang ekonomi berkaitan erat dengan kemiskinan. Partisipasi sekolah sangat dipengaruhi dengan latar belakang ekonomi terutama dari sisi kesejahteraan keluarga. Anak yang terlahir dari keluarga miskin tidak mudah dalam melanjutkan untuk bersekolah dan bahkan terlampau sulit hingga memutuskan menjadi pekerja anak usia dini. Menjadi pekerja anak usia dini didukung dengan latar belakang ekonomi keluarga yang tidak menguntungkan.

Kemiskinan menjadi salah satu faktor tidak dapatnya melanjutkan pendidikan, karena apabila suatu keluarga memutuskan untuk memberikan pendidikan kepada anaknya maka bersedia untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk pendidikan. Jika tidak memiliki biaya yang cukup untuk pendidikan maka terhambatlah jenjang pendidikannya. Terlebih pendidikan digolongkan sebagai kebutuhan setelah sandang dan pangan. Jika suatu golongan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan primer maka digolongkan sebagai golongan yang berpeghasilan rendah dan sebahagian kasus tidak dapatnya melanjutkan sekolah dikarenakan ketretbatasan ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

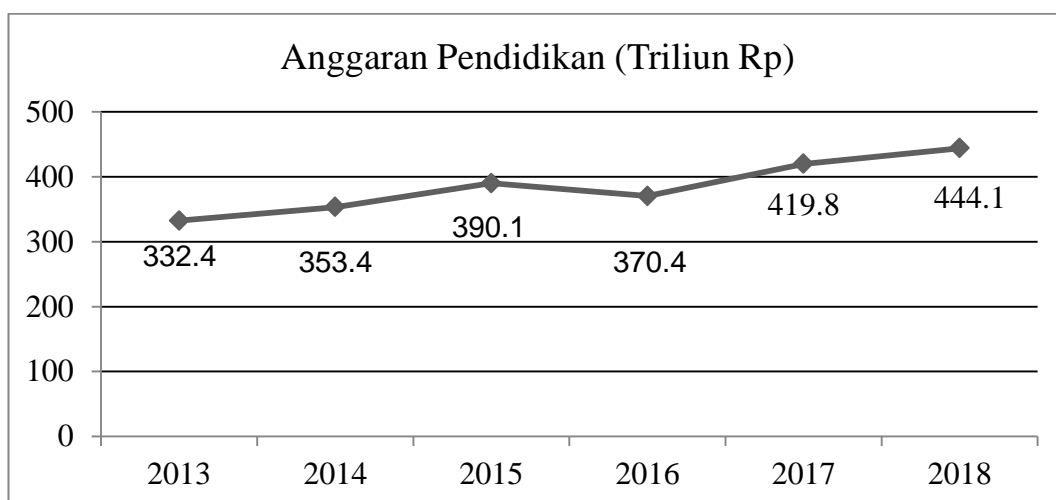
Gambar I.3

Grafik Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)

Berdasarkan data kemiskinan Jumlah masyarakat miskin pada tahun 2018 dimana masih banyak wilayah dengan jumlah presentase penduduk miskin di atas rata-rata presentase penduduk miskin 10.64 %. Artinya dengan masih banyaknya penduduk miskin maka semakin banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Kawasan miskin memiliki ciri-ciri indeks pendidikan yang rendah karena tingginya biaya pendidikan dan rendahnya pendapatan membuat penduduk miskin kesulitan dalam memperoleh pendidikan (Manarung, 2015).

Meskipun pemerintah berupaya untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi masih ada banyak daerah provinsi yang jumlah masyarakat miskin masih tergolong tinggi otomatis masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Menaikan jumlah presentase angka partisipasi sekolah selain menekan jumlah penduduk miskin, pemerintah juga berupaya melalui anggaran pendidikan. Salah satu faktor yang dapat menaikkan jumlah angka partisipasi sekolah adalah

anggaran pendidikan. Permasalahan latar belakang ekonomi keluarga yang menjadi faktor keputusan untuk bersekolah atau tidak. Menjadikan pemerintah terus bergerak dengan menambahkan anggaran pendidikan disetiap tahunnya.



Sumber : Kementerian Keuangan 2018

Gambar I.4

Grafik Anggaran Pendidikan (Triliun)

Data menunjukkan anggaran pendidikan yang mana Pemerintah menyediakan dana yang dianggarkan untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, yang setiap tahunnya dana tersebut selalu di naikan anggarannya. Jika anggran tersebut dinaikan maka tiadak ada lagi cerita anak pelosok yang tidak dapat bersekolah karena alasan ketidakadaan biaya. Permasalahan yang cukup kompleks pemerintah sudah berupaya menaikkan anggaran pendidikan namun masih saja menjadi kendala ketidakadaan biaya untuk bersekolah. Pengalokasian anggaran pendidikan dari pusat disalurkan untuk daerah, apakah sudah bersistem dengan baik ataukah tidak. Menjadikan kendala untuk pemerintah program pendidikan menaikkan angka partisipasi sekolah. Seperti yang dikutip dalam (CNN Indonesia, 2019) Dilema

Anggaran Jumbo Pendidikan Minim Hasil. Meningkatnya anggaran pendidikan belum mampu memperbaiki partisipasi sekolah.

Pemerataan pendidikan belum dapat diwujudkan terlebih untuk jenjang pendidikan 16-18 tahun, mengingat Angka Partisipasi Sekolah menurun setiap bertambahnya usia. Sebahagian masyarakat usia sekolah yang tidak dapat mengenyam pendidikan dikarenakan faktor kemiskinan, selain itu juga keterbatasan biaya, dan umumnya terjadi pada tingkatan usia sekolah 16-18 tahun yang memiliki tingkat presentase partisipasi sekolahnya yang sedikit. Maka dari itu dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan Masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kemiskinan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia ?
3. Apakah terdapat pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dipercaya (Shaih, Benar, dan Valid) dan (Dapat Diadalkan, Reliabel) tentang :

1. Pengaruh Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia
2. Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia
3. Pengaruh Kemiskinan dan Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan informasi dalam bidang pendidikan ekonomi khususnya mengenai seberapa besar pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah. Penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dengan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dan dapat berguna untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan serta menambah referensi yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian.